

Peran Dinas Perindustrian Terhadap Industri Kecil Menengah di Nusa Tenggara Barat Perspektif Ekonomi Islam

Eko Saputra Bay, Mohammad Abdun Nasir, dan Muhammad Yusup
ekosaputrabay11@gmail.com, m.a.nasir@uinmataram.ac.id,
muhamadyusup@uinmataram.ac.id,
UIN Mataram, Nusa Tenggara Barat

Abstrak

Industri Kecil dan Menengah (IKM) memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi lokal khususnya bagi masyarakat kelas menengah ke bawah, sehingga memerlukan dukungan dari pemerintah daerah melalui program pemberdayaan yang terarah dan berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran Dinas Perindustrian Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dalam pengembangan ekonomi lokal melalui pemberdayaan IKM, mengidentifikasi kendala yang dihadapi pelaku IKM, serta mengkaji program tersebut dalam perspektif ekonomi Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui tahapan pengorganisasian data, reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Perindustrian NTB berperan dalam pemberdayaan IKM melalui pelatihan dan penyuluhan, fasilitasi akses permodalan, peningkatan kualitas produk, bimbingan teknis, bantuan teknologi, sertifikasi, serta dukungan akses pasar. Namun pelaku IKM masih menghadapi berbagai kendala berupa keterbatasan akses permodalan, tingginya biaya dan regulasi sertifikasi, rendahnya literasi digital, serta keterbatasan logistik dan distribusi. Dalam perspektif ekonomi Islam, program pemberdayaan IKM tersebut sejalan dengan prinsip kemaslahatan berlandaskan *maqāṣid al-sharī'ah*, khususnya melalui penerapan nilai *ta'āwun* (tolong-menolong) dan *takaful* (*saling menjamin*) yang menekankan solidaritas sosial dan keadilan distribusi dalam perekonomian.

Kata Kunci: Dinas Perindustrian NTB, Pemberdayaan, Pengembangan IKM, Ekonomi Islam

Abstract

Small and Medium Industries (SMIs) play a strategic role in local economic development, particularly for lower- and middle-income communities, thus requiring support from local governments through well-directed and sustainable empowerment programs. This study aims to analyze the role of the West Nusa Tenggara (NTB) Provincial Office of Industry in local economic development through SMI empowerment, identify the constraints faced by SMI actors, and examine these programs from an Islamic economics perspective. This research employs a descriptive qualitative approach, with data collected through observation, interviews, and documentation. Data analysis was conducted through data organization, reduction, presentation, and conclusion drawing. The findings indicate that the NTB Office of Industry plays a role in empowering SMIs through training and extension services, facilitation of access to capital, improvement of product quality, technical guidance, technological assistance, certification, and support for market access. However, SMI actors continue to face several constraints, including limited access to capital, high certification costs and regulatory requirements, low digital literacy, and limitations in logistics and distribution. From an Islamic economics perspective, SMI empowerment programs are aligned with the principle of public interest (*maṣlaḥah*) based on *maqāṣid al-sharī'ah*, particularly through the application of *ta'āwun* (mutual assistance) and *takaful* (mutual guarantee), which emphasize social solidarity and distributive justice in the economy.

Keyword: NTB Office of Industry, Empowerment, SMI Development, Islamic Economics

PENDAHULUAN

Industri Kecil Menengah (IKM) merupakan fondasi utama dalam memperkuat perekonomian daerah dan meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat. Hal ini dikarenakan pemberdayaannya memberikan kekuatan, pengetahuan, dan sumber daya dalam menghasilkan pola perubahan, peningkatan kapasitas dan partisipasi masyarakat. Peran pemerintah bertujuan mengarahkan IKM agar dapat mencapai ekonomi mikro berbasis kerakyatan yang mandiri, serta mendukung pembentukan produk nasional, perluasan kesempatan kerja serta meningkatkan ekspor sekaligus pemerataan pendapatan (Kadek Wulandari Laksmi, 2023, hal. 105). Pengembangan IKM tidak hanya bertujuan meningkatkan taraf hidup masyarakat, tetapi juga mendukung prinsip-prinsip keadilan, kesejahteraan bersama, dan penuntasan kemiskinan. Namun sektor ini kerap menghadapi

banyak tantangan, seperti keterbatasan akses modal dan teknologi, kurangnya pengembangan infrastruktur, serta kekurangan kapasitas dan keterampilan. Sehingga peran pemerintah sangat diperlukan untuk mendorong pengembangan perekonomian sektor IKM.

Dalam Islam, negara berperan pada aspek perekonomian dengan menggunakan instrumen kekuasaannya serta dilakukan secara demokratis, adil, dan nilai-nilai Islam menjadi dasarnya. Peran strategis ini berpotensi menciptakan kesejahteraan masyarakat karena sebagai pemegang amanah, pemerintah dituntut untuk mengelola perekonomian dengan baik dalam skala mikro maupun lebih luas atau berskala makro. (Yolanda Britania, 2024, hlm. 417). Prinsip khalifah juga menjelaskan peran manusia sebagai wakil Allah di muka bumi memiliki tanggung jawab dalam pembangunan. Dari konteks inilah peran pemerintah sesuai dengan tujuan ekonomi Islam, yaitu mengupayakan terwujudnya konsep pasar berupa *falab* yang direalisasikan melalui optimalisasi *maslahah*. Maka peran pemerintah yaitu menciptakan ke-*maslahaa*-an bagi seluruh masyarakat (Sofyan, 2016, hal. 291-292). Walaupun pemerintah memainkan peran yang kecil, tetapi sangat penting karena menjamin perekonomian dapat berjalan sesuai prinsip syariah sekaligus memastikan tidak terajadnya pelanggaran hak-hak manusia. (Adlan, 2021, hal. 94).

IKM di Nusa Tenggara Barat (NTB) memiliki potensi besar untuk dikembangkan karena keberagaman sumber daya alam dan kekayaan lokal. Namun sektor ini masih menghadapi kendala keterbatasan akses permodalan, kapasitas sumber daya manusia yang belum optimal, serta tantangan pemasaran produk. Sehingga memerlukan peran pemerintah untuk melakukan pembinaan, pendampingan, dan fasilitasi terhadap pelaku IKM dalam meningkatkan daya saing di tingkat lokal maupun global. Pengembangan IKM di Indonesia didasari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 bahwa daerah memiliki kewenangan dalam mengelola daerahnya sendiri. Begitupun kebijakan industrialisasi Provinsi Nusa Tenggara Barat tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 13 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan industri bertujuan meningkatkan perekonomian masyarakat melalui pelaksanaan otonomi daerah. Maka dengan IKM, Provinsi NTB dapat mengatur dan mengelola perekonomiannya.

Dewi Sartika Nasution “*Peningkatan Kapasitas Manajemen Usaha Bagi Pelaku Usaha Sektor Industri UKM Roti Sebagai Upaya Peningkatan Daya Saing Usaha Menuju Industri Mandiri*”

menunjukkan peran pemerintah melakukan pengembangan usaha melalui pendampingan, pelatihan dan sosialisasi kepada para pengusaha makanan ringan mengenai cara pengurusan ijin edar dari Dinas Kesehatan dan cara pembukuan sebagai dukungan untuk manajemen usaha (Dewi Sartika Nasution, 2018). Sri Nur Wahyuni “*Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemeberdayaan Industri Kecil Menengah (IKM) di Kabupaten Muna Tahun 2020*” bahwa pemerintah Kabupaten Muna belum maksimal memberdayakan Industri Kecil Menengah karena kurangnya sentral IKM, serta dipengaruhi oleh kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana, kemitraan, partisipasi masyarakat serta penghambatnya yaitu minimnya anggaran pada implemetasi program (Wahyuni, 2020). Rizky Wahyudi “*Peran Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam Pengembangan Industri Kecil Menengah Kota Medan*” menjelaskan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan melakukan pembinaan terhadap industri-industri melalui kerja sama serta mencegah adanya monopoli pada kalangan industri kecil dan menengah (Wahyudi, 2022). Ayu Andini & Wahyu Syarvina “*Peran Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam Sarana Mengembangkan IKM di Kabupaten Deli Serdang*” menunjukkan peran Disperindag membantu masyarakat melalui pelatihan bagi IKM serta mengontrol perkembangannya agar lebih maksimal (Syarvina, 2024). Muhammad Darul & Sisi Amalia “*Peranan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Ekonomi Sumberdaya Mineral dalam Pemberdayaan IKM (Industri Kecil MenengahI di Kota Pontianak)*” menjelaskan Disperindag sebagai fasilitator pemberdayaan IKM melakukan pelatihan, pengawasan, dan pendanaan dalam hal administrasi pendaftaran labelisasi produk. (Muhammad Darul Fadli, 2023).

Penelitian ini bertujuan mengkaji peran Dinas Perindustrian NTB dalam pengembangan IKM serta dampaknya bagi pelaku IKM melalui perspektif ekonomi Islam. Kajian ini memfokuskan perspektif ekonomi Islam yang menekankan keadilan distribusi, pemerataan akses usaha, dan perlindungan aset ekonomi masyarakat (*hifẓ al-mal*). Bahwa pemberdayaan ekonomi tidak hanya berorientasi pada peningkatan pendapatan, tetapi juga mencerminkan nilai kemaslahatan, solidaritas, dan keberlanjutan yang menjadi bagian penting dari *maqasid syariah*. Pemberdayaan IKM tidak hanya dipahami sebagai upaya meningkatkan produktivitas atau pertumbuhan sektor industri kecil. Lebih dari itu adalah menjadi penguat kapasitas ekonomi masyarakat yang mencerminkan prinsip *al-‘adl, ta’awun*, dan *hifẓ al-mal*.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif untuk memahami fenomena secara mendalam melalui pengalaman dan sudut pandang subjek. Data yang dikumpulkan bersifat induktif dan dianalisis dalam konteksnya serta dengan fokus pada makna serta relevansi temuan. Penelitian dilakukan di Dinas Perindustrian Provinsi Nusa Tenggara Barat, melibatkan pelaku Industri Kecil Menengah. Pemilihan lokasi didasarkan pada pentingnya peran IKM dalam perekonomian daerah. Data dikumpulkan melalui observasi non-partisipan, wawancara tidak terstruktur, dan dokumentasi. Observasi berfokus pada peran Dinas Perindustrian dalam mendukung sertifikasi, pelatihan, pembiayaan, dan pemasaran, serta kegiatan IKM dalam produksi dan promosi. Peneliti melibatkan 12 informan yang terdiri dari 6 pegawai Dinas Perindustrian NTB dan 6 pelaku IKM. Data yang diperoleh mencakup data primer dari observasi dan wawancara, serta data sekunder dari literatur, dokumen resmi, laporan institusi, dan publikasi ilmiah. Analisis data mengikuti model Miles dan Huberman, yang mencakup reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data dijamin melalui ketekunan pengamatan, triangulasi sumber, serta kecukupan referensi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Industri Kecil dan Menengah (IKM) di Nusa Tenggara Barat (NTB) menjadi ujung tombak dalam menciptakan lapangan kerja, mengurangi pengangguran, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Perannya sangat penting karena tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga sebagai fasilitator pemberdayaan ekonomi masyarakat. Sejalan dengan teori pemberdayaan dari Payne bahwa pemberdayaan sebagai proses pemberian kapasitas kepada individu dan kelompok untuk mengontrol sumber daya dan menentukan masa depannya sendiri (Payne, 1997). Dalam konteks ini, Dinas Perindustrian NTB berperan sebagai fasilitator utama pemberdayaan melalui tiga aspek utama, yakni fasilitasi sertifikasi dan akses pasar, peningkatan kapasitas dan inovasi IKM, serta dukungan program industrialisasi. Melalui pendekatan ini, pemerintah daerah berusaha membentuk struktur yang mendukung tindakan ekonomi berkelanjutan, sebagaimana strukturasi Anthony Giddens bahwa struktur sosial dan tindakan manusia saling membentuk dan dipengaruhi satu sama lain (Putri, 2022).

Sertifikasi Produk dan Akses Pasar

Pemberdayaan IKM tidak hanya berhenti pada peningkatan kapasitas produksi, tetapi juga harus diarahkan pada pencapaian kualitas produk yang memenuhi standar pasar. Salah satu langkah strategis yang diambil oleh Dinas Perindustrian NTB adalah dengan memfasilitasi proses sertifikasi produk IKM serta mendukung legalitas usaha. Hal ini sejalan dengan pendekatan pemberdayaan ekonomi berbasis daya saing yang menitikberatkan pada kualitas, standar, dan kepercayaan konsumen sebagai modal utama dalam mengakses pasar yang lebih luas. Michael Porter berpendapat bahwa keunggulan kompetitif menekankan sertifikasi produk merupakan bagian dari strategi diferensiasi yang dapat meningkatkan daya saing sebuah produk (Porter, 1985). Dalam hal ini, keberadaan sertifikasi bukan hanya menjadi instrumen formalitas administratif, tetapi juga penanda kualitas dan jaminan kepercayaan konsumen. Dinas Perindustrian NTB menjalankan fungsi pemberdayaan dengan mendorong IKM untuk memperoleh legalitas dan sertifikasi melalui pendampingan teknis dan administratif kepada pelaku IKM, serta pemanfaatan platform SIINas (Sistem Informasi Industri Nasional) untuk mendigitalisasi proses pendataan industri dan pengajuan dokumen. Melalui program fasilitasi inilah IKM menjadi lebih terbantu ketika sebelumnya mengalami kesulitan akses proses birokrasi yang panjang dan kompleks. SIINas sendiri dapat memungkinkan Dinas untuk mempercepat proses registrasi industri dan legalitas produk.

Produk yang memiliki sertifikasi dianggap memiliki nilai tambah karena jaminan kualitas yang lebih baik serta kepatuhan terhadap berlakunya regulasi. Sertifikasi juga memudahkan produk IKM untuk memasuki pasar lebih luas, baik nasional maupun internasional karena telah memenuhi standar yang disyaratkan oleh berbagai otoritas. Sebagaimana Kotler dan Keller mengungkapkan bahwa sertifikasi bersama strategi branding yang efektif dapat meningkatkan loyalitas konsumen dan membantu produk lokal bersaing dengan produk industri besar (Kotler dkk., 2016). Sertifikasi juga memiliki dampak signifikan terhadap peningkatan daya saing produk. Sehingga produk yang telah memperoleh sertifikasi lebih besar peluangnya untuk masuk ke jaringan ritel modern dan e-commerce, serta berpotensi meningkatkan ekspor dan penjualan produk (Alwi dkk., 2019). Bahwa kebanyakan konsumen cenderung memilih produk yang memiliki sertifikasi, terutama dalam kategori makanan dan minuman, karena dianggap lebih aman dan

berkualitas (Anita & Iznillah, 2023). Namun demikian, seperti diungkapkan oleh Ibu Iwin Isnaini pemilik IKM Kosmetik, bahwa kendala utama justru terletak pada akses pasar. Meskipun sudah dibina dan difasilitasi, tanpa adanya keterhubungan langsung dengan distributor besar atau event skala nasional yang lebih kompetitif, produk IKM berisiko terjebak dalam persaingan lokal yang tidak sehat. Sehingga pelaku IKM lebih banyak menyarankan agar Dinas Perindustrian dapat menjembatani IKM dengan ekosistem pasar yang lebih luas dan berkelanjutan.

Dinas Perindustrian NTB juga telah berupaya membuka akses pasar bagi IKM melalui berbagai inisiatif seperti fasilitasi keikutsertaan dalam pameran, membuka event-event untuk memperkenalkan produk IKM serta menyediakan pusat belanja, akan tetapi diperlukan kerja sama dengan *platform e-commerce*, serta kemitraan jaringan ritel nasional dan internasional agar dapat menyediakan akses pasar bagi produk IKM. Langkah-langkah ini sejalan dengan pandangan Keegan yang menekankan pentingnya diversifikasi saluran distribusi dan strategi pemasaran berbasis digital untuk meningkatkan daya saing produk lokal (Keegan, 2016). Dalam konteks pemasaran digital, sertifikasi memainkan peran penting dalam meningkatkan visibilitas dan kredibilitas produk di *platform e-commerce*. Bahwa produk yang memiliki sertifikasi lebih sering muncul dalam hasil pencarian di *platform e-commerce* karena algoritma mesin pencari cenderung memprioritaskan produk dengan reputasi yang lebih baik (Chaffey & Smith, 2017). Maka integrasi sertifikasi dalam strategi pemasaran digital dapat membantu meningkatkan konversi penjualan serta membangun loyalitas konsumen. Selanjutnya, efektivitas program sertifikasi tersebut memerlukan pendekatan berbasis kebijakan yang lebih inklusif. Dikarenakan kebijakan yang mendukung sertifikasi mencakup aspek aksesibilitas, transparansi, dan insentif bagi pelaku usaha kecil (Henson & Humphrey, 2010). Sehingga sertifikasi tidak hanya menjadi alat untuk meningkatkan daya saing, melainkan juga sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi bagi IKM.

Peningkatan Kapasitas dan Inovasi IKM

Dinas Perindustrian NTB telah mengimplementasikan berbagai program pelatihan dan pendampingan guna meningkatkan keterampilan sumber daya manusia di sektor industri. Program ini mencakup pelatihan penggunaan teknologi produksi, manajemen

usaha, serta strategi pemasaran berbasis digital. Namun hal tersebut terlihat belum efektif karena pertumbuhan ekonomi sangat dipengaruhi oleh inovasi yang dihasilkan dari pelaku usaha. Sebagaimana identifikasi Schumpeter menunjukkan bahwa terdapat lima jenis inovasi utama, yaitu pengenalan produk baru, metode produksi baru, pembukaan pasar baru, sumber bahan baku baru, dan perubahan dalam organisasi industri (Schumpeter, 2021). Inovasi IKM tidak hanya terbatas pada pengembangan produk baru, tetapi juga melibatkan transformasi model bisnis dan strategi pemasaran. Bahwa inovasi dalam proses produksi dan pemasaran dapat meningkatkan efisiensi serta mempercepat pertumbuhan industri kecil (Drucker, 2006). Terutama melalui teknologi yang lebih efisien, memungkinkan IKM untuk menghasilkan produk dengan kualitas lebih baik dan biaya produksi lebih rendah, sehingga dapat bersaing di pasar yang lebih luas (Christensen, 1997).

Di NTB sendiri, berbagai pelatihan penggunaan teknologi telah dilakukan sebagai upaya untuk mempermudah para pelaku IKM, hanya saja kesiapan sumber daya dalam mengorganisir serta memajukan juga masih terhambat. Bahwa memang inovasi dan adopsi teknologi dapat menjadi faktor diferensiasi utama bagi usaha kecil dan menengah dalam menghadapi persaingan global (Gans & Stern, 2003), namun keberhasilannya pada prosesnya memerlukan dukungan dari struktur organisasi yang fleksibel serta kepemimpinan visioner. (Tidd & Bessant, 2020). Hal ini menunjukkan bahwa IKM yang ingin meningkatkan daya saingnya tidak harus hanya fokus pada aspek teknis, tetapi juga penguatan kapasitas manajerial dan strategi bisnisnya. Selain itu, peningkatan kapasitas IKM dalam inovasi juga terkait dengan akses terhadap sumber daya berupa modal, teknologi, maupun pengetahuan. Sebagaimana Hall dan Khan menunjukkan bahwa adopsi teknologi baru sering kali terkendala oleh faktor biaya dan kurangnya akses terhadap informasi (Hall & Khan, 2003). Sehingga intervensi pemerintah melalui kebijakan insentif dan fasilitasi adopsi teknologi menjadi krusial dalam mendukung pertumbuhan IKM.

Dalam konteks kebijakan, pendekatan berbasis ekosistem inovasi menjadi penting untuk mendukung perkembangan IKM. Alasannya karena daya saing suatu industri sangat dipengaruhi oleh lingkungan bisnisnya, termasuk ketersediaan tenaga kerja terampil, infrastruktur teknologi, serta dukungan regulasi yang kondusif (Porter, 1985). Ekosistem kewirausahaan yang dinamis dapat mendorong inovasi di sektor industri kecil dan

menengah (Audretsch, 2001). Selain itu, kolaborasi antara IKM lembaga penelitian, dan institusi pendidikan juga dapat mempercepat inovasi. Maka pentingnya keterbukaan dalam proses inovasi yaitu ketika IKM atau perusahaan tidak hanya mengandalkan penelitian internal, tetapi juga berkolaborasi dengan pihak eksternal untuk mengembangkan solusi baru Chesbrough, 2003). Model ini sangat relevan bagi IKM yang sering kali memiliki keterbatasan sumber daya dalam melakukan riset dan pengembangan secara mandiri.

Namun, tantangan implementasi inovasi di sektor IKM tetap signifikan karena dasarnya bersifat kompleks dan tidak linier, sehingga memerlukan pendekatan yang lebih sistematis dalam penerapannya (Rosenberg & Landau, 1986). Pendekatan secara menyeluruh dalam mendukung inovasi IKM mencakup aspek teknologi, organisasi, kebijakan, serta kolaborasi dengan berbagai pihak, menjadi sangat penting. Pendekatan berbasis ekosistem inovasi, kolaborasi antar pemangku kepentingan, serta adopsi teknologi yang sesuai dapat menjadi strategi efektif dalam mendorong pertumbuhan sektor IKM. Sehingga intervensi yang sistematis dan berbasis bukti sangat diperlukan untuk memastikan bahwa inovasi dapat menjadi katalisator bagi perkembangan industri kecil dan menengah.

Dukungan terhadap Program Industrialisasi Daerah

Dinas Perindustrian NTB memainkan peran sentral dalam mendukung program ini dengan menyediakan fasilitas produksi, insentif bagi pelaku industri kecil dan menengah (IKM), serta pembinaan yang bertujuan meningkatkan standar industri di daerah tersebut. Kebijakan pemerintah dalam aspek industrialisasi ini diarahkan pada sektor-sektor unggulan seperti industri makanan dan minuman berbasis sumber daya lokal, kerajinan, serta tekstil. Sektor-sektor ini dipilih berdasarkan potensi daerah dan ketersediaan bahan baku, sehingga dapat menciptakan nilai tambah yang optimal bagi ekonomi lokal. Pendekatan ekonomi spasial kemudian menekankan pentingnya pengembangan infrastruktur industri. Terutama di NTB, pengembangan infrastruktur industri diterapkan pada kawasan industri terpadu dan pusat logistic dalam meningkatkan efisiensi produksi serta mempercepat distribusi barang ke pasar yang lebih luas. Bahwa keberadaan infrastruktur industri yang memadai dapat mengurangi biaya transportasi, memperkuat rantai pasok, serta meningkatkan daya saing produk lokal di pasar domestik maupun

internasional (Krugman, 1991). Namun, keberhasilan industrialisasi suatu daerah juga bergantung pada klaster industri yang kuat (Porter, 1990). Di mana, klaster industri menunjukkan keterkaitan perusahaan dalam suatu wilayah geografis tertentu, yang dapat menciptakan sinergi dan meningkatkan daya saing secara kolektif. Dalam konteks NTB, pengembangan klaster industri berbasis sumber daya lokal dapat meningkatkan efisiensi produksi dan inovasi produk melalui kolaborasi antara pelaku industri, pemerintah, dan institusi akademik.

Dukungan terhadap industrialisasi di NTB juga mencakup aspek kebijakan dan regulasi yang mendukung pertumbuhan sektor industri. Misalnya, insentif fiskal dan kemudahan perizinan bagi pelaku IKM dapat mendorong investasi dalam sektor industri. Selain itu, peningkatan akses terhadap pembiayaan dan modal usaha melalui perbankan dan lembaga keuangan mikro juga menjadi faktor penting dalam mendukung pertumbuhan industri lokal. Bahwa industrialisasi yang sukses memerlukan intervensi kebijakan yang tepat, terutama dalam hal perlindungan terhadap industri yang baru berkembang (Rodrik, 2004). Kebijakan Dinas Perindustrian melalui proteksionis terhadap produk lokal dapat membantu industri dalam negeri untuk berkembang sebelum bersaing di pasar global. Namun, kebijakan ini harus diimbangi dengan upaya peningkatan kualitas dan inovasi produk agar tidak menciptakan ketergantungan yang berlebihan pada proteksi pemerintah.

Aspek sumber daya manusia juga merupakan faktor krusial dalam keberhasilan industrialisasi. Di mana, investasi dalam pendidikan dan pelatihan tenaga kerja dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing industri (Becker, 1994). Dalam konteks NTB, program pelatihan keterampilan bagi tenaga kerja lokal, terutama dalam sektor industri makanan, kerajinan, dan tekstil, dapat meningkatkan kualitas produksi serta menciptakan lapangan kerja yang lebih banyak. Dalam praktiknya, keberhasilan industrialisasi di NTB juga bergantung pada sinergi antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, sektor swasta, akademisi, dan masyarakat. Kolaborasi antara sektor publik dan swasta dalam bentuk kemitraan strategis dapat mempercepat pengembangan sektor industri dan menciptakan ekosistem bisnis yang lebih dinamis.

Kendala Pemberdayaan bagi Pelaku Industri Kecil Menengah di Nusa Tenggara Barat

1. Memfasilitasi Akses Permodalan

Permasalahan keterbatasan akses permodalan bagi pelaku IKM di Nusa Tenggara Barat menjadi tantangan yang serius dalam mendorong pertumbuhan sektor ini. Permodalan berperan penting dalam berbagai aspek pengembangan usaha, baik untuk investasi awal, peningkatan kapasitas produksi, hingga ekspansi pasar. Permodalan merupakan faktor utama dalam menciptakan inovasi yang pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi (Schumpeter, 2021). Salah satu dampak paling nyata dari peran Dinas Perindustrian adalah memfasilitasi pelaku IKM dalam mengakses permodalan. Akses terhadap pembiayaan menjadi faktor penentu dalam pengembangan usaha, baik untuk peningkatan kapasitas produksi, pembelian alat baru, maupun ekspansi pasar. Namun banyak pelaku IKM menghadapi kendala dalam mengakses pinjaman dari lembaga keuangan formal karena keterbatasan agunan serta rendahnya literasi keuangan.

Dalam menghadapi tantangan tersebut, Dinas Perindustrian NTB menyediakan Sistem Informasi Manajemen Industri (SIMANIS) yang bertujuan untuk mengintegrasikan data IKM dan menjadi jembatan antara pelaku usaha dengan pemberi modal. Meskipun dinas tidak memberikan modal secara langsung, platform ini menjadi saluran informasi dan dokumentasi yang memudahkan lembaga keuangan dalam menilai kelayakan usaha. Namun efektivitas SIMANIS masih memerlukan peningkatan, terutama dalam aspek sosialisasi dan pendampingan. Sebagian pelaku IKM masih kesulitan dalam memahami prosedur teknis pengajuan modal melalui platform tersebut. Dampak dari peran dinas dalam hal ini belum sepenuhnya optimal dan memerlukan langkah proaktif seperti peningkatan literasi keuangan, pelatihan teknis, serta keterlibatan aktif lembaga keuangan dalam pemanfaatan data SIMANIS serta minimnya integrasi dengan lembaga keuangan, yang seharusnya menjadikan SIMANIS sebagai rujukan penilaian kredit usaha.

Bahwa lembaga keuangan cenderung selektif dalam menyalurkan kredit guna menghindari risiko kredit macet (Stiglitz & Weiss, 1981). Ketatnya persyaratan yang ditetapkan oleh perbankan menyebabkan banyak pelaku IKM kesulitan memperoleh pinjaman formal. Banyak pelaku IKM di Indonesia, termasuk di NTB kemudian bergantung pada modal sendiri atau pinjaman informal dengan keterbatasan dalam jumlah

dan suku bunga yang lebih tinggi (Tambunan, 2021). Hambatan finansial merupakan salah satu faktor utama pertumbuhan usaha kecil sulit berkembang. Bahwa ketika akses permodalan terbatas, usaha kecil lebih rentan terhadap guncangan ekonomi dan memiliki kapasitas inovasi yang lebih rendah dibandingkan usaha yang memiliki akses pendanaan memadai (Beck dkk., 2005). Rendahnya literasi keuangan di kalangan pelaku IKM turut memperburuk masalah akses permodalan. Dikarenakan literasi keuangan yang rendah dapat menyebabkan pelaku usaha kesulitan dalam memahami ketersediaan skema pembiayaan, serta dalam mengelola risiko keuangan (Lusardi & Mitchell, 2014). Kompleksitas birokrasi dalam proses pengajuan pinjaman juga menjadi kendala tambahan yang semakin mempersempit peluang IKM untuk mendapatkan kebutuhan modal.

Kebijakan yang inklusif diperlukan untuk meningkatkan akses permodalan bagi pelaku IKM. Salah satu strategi yang dapat diterapkan yaitu dengan memperluas skema pembiayaan berbasis inklusi keuangan, seperti *fintech lending* dan *peer-to-peer* (P2P) lending. Bahwa *fintech* memiliki potensi besar dalam menjembatani kesenjangan akses kredit, terutama bagi usaha kecil yang tidak memiliki akses ke layanan perbankan konvensional (Claessens dkk., 2018). Di beberapa negara berkembang, platform *fintech* telah terbukti mampu meningkatkan tingkat inklusi keuangan dengan menyediakan pinjaman mikro berbasis teknologi yang lebih fleksibel dibandingkan dengan bank konvensional. Penyederhanaan prosedur pengajuan kredit bagi IKM juga perlu dilakukan guna meningkatkan partisipasi dalam program pembiayaan yang tersedia. Menurut World Bank, birokrasi yang kompleks sering kali menjadi hambatan utama dalam akses terhadap kredit usaha kecil (World Bank, 2020). Sehingga reformasi regulasi yang lebih berpihak pada usaha kecil, seperti pengurangan persyaratan administrasi dan pemberian insentif bagi lembaga keuangan dalam menyalurkan kredit kepada IKM dapat menjadi solusi yang efektif pada peningkatan akses permodalan di NTB.

Pemerintah dapat berperan dalam menyediakan subsidi bunga bagi kredit usaha kecil, sementara lembaga keuangan dapat mengembangkan produk kredit yang lebih adaptif terhadap kebutuhan IKM. Selain itu, kolaborasi dengan sektor swasta, seperti perusahaan besar dan investor lokal, dapat membuka peluang pendanaan berbasis kemitraan yang lebih fleksibel bagi pelaku usaha kecil. Dengan berbagai tantangan yang dihadapi IKM dalam akses permodalan, solusi yang bersifat multidimensional diperlukan

untuk memastikan keberlanjutan dan pertumbuhan sektor ekonomi. Akses terhadap modal yang lebih mudah, peningkatan literasi keuangan, serta kebijakan inklusif akan menjadi kunci dalam mendorong perkembangan IKM di NTB.

2. Peningkatan Kapasitas dan Inovasi IKM

Era digital telah membawa perubahan mendasar cara IKM beroperasi serta memungkinkan efisiensi produksi yang lebih tinggi dan akses pasar menjadi lebih luas. Namun di Nusa Tenggara Barat, tingkat adopsi teknologi digital di kalangan IKM masih tergolong rendah. Bahwa kecepatan adopsi teknologi sangat bergantung pada lima karakteristik utama berupa keuntungan relatif (*relative advantage*), kompatibilitas (*compatibility*), kompleksitas (*complexity*), ketercobaan (*trialability*), dan keteramatan (*observability*) (Rogers, 1995). Keuntungan relatif merujuk pada sejauh mana suatu inovasi dianggap lebih baik dibandingkan metode sebelumnya. Sayangnya di NTB masih banyak pelaku IKM yang sangat kurang memahami manfaat nyata dari teknologi digital karena minimnya literasi digital serta kurangnya sosialisasi tentang dampak positifnya terhadap efisiensi produksi dan akses pasar (Setiawan, 2020, hlm. 54).

Banyak IKM di NTB yang masih menggunakan metode tradisional dalam produksi, pemasaran, dan distribusi. Pada banyak kasus, pelaku usaha merasa bahwa penerapan teknologi baru memerlukan perubahan besar dalam cara mereka beroperasi, yang memunculkan resistensi terhadap perubahan. Dalam *Technology Acceptance Model* (TAM), persepsi kemudahan penggunaan dan persepsi kegunaan sangat menentukan penerimaan teknologi oleh pengguna (Davis, 1989). Rata-rata IKM di NTB menghadapi kendala dalam memahami serta mengoperasikan perangkat digital akibat kurangnya SDM yang memadai. Barney kemudian menekankan bahwa keunggulan kompetitif dapat diperoleh melalui pemanfaatan sumber daya internal yang unik dan sulit ditiru, termasuk sumber daya teknologi (Barney, 1991). Padahal teknologi digital dapat menjadi aset strategis bagi IKM di NTB dalam meningkatkan daya saing. Namun data dari Badan Pusat Statistik (BPS) NTB menunjukkan bahwa hanya sekitar 35% IKM yang telah mengintegrasikan teknologi digital dalam operasional (Badan Pusat Statistik NTB, 2022). Mayoritas masih bergantung pada metode konvensional, sehingga kesulitan bersaing di pasar yang semakin kompetitif. Bahwa transformasi digital dalam bisnis kecil dapat

meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi biaya produksi, dan memperluas jangkauan pasar (Chatterjee & Kumar Kar, 2020). Sehingga perusahaan yang mengadopsi teknologi digital dengan baik cenderung mengalami pertumbuhan lebih cepat dibandingkan dengan metode tradisional. (Zhu dkk., 2006).

Kendala utama dalam adopsi teknologi digital di NTB mencakup keterbatasan modal serta kurangnya pengetahuan dan keterampilan digital pada kalangan pelaku usaha. Akses terhadap pembiayaan merupakan tantangan utama bagi usaha kecil dan menengah, terutama di negara-negara berkembang (Beck & Demirguc-Kunt, 2006). Tanpa akses modal yang memadai, sulit bagi IKM untuk mengadopsi teknologi serta memerlukan investasi awal dengan modal besar. Solusi terhadap tantangan ini mencakup kebijakan pemerintah dalam mendukung digitalisasi IKM, seperti program pelatihan digital secara lebih luas, insentif bagi pelaku usaha untuk mengadopsi teknologi digital, serta peningkatan infrastruktur digital. Program-program yang telah diterapkan di beberapa negara lain dapat menjadi acuan bagi NTB dalam mendorong transformasi digital di sektor IKM (Ainurrokhim dkk., t.t.). Selain itu, kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan lembaga pendidikan dapat menjadi strategi efektif untuk mempercepat transformasi digital di NTB. Pelatihan berbasis komunitas yang bekerja sama dengan universitas dan perusahaan teknologi dapat membantu meningkatkan literasi digital di kalangan pelaku IKM. Bahwa kemitraan antara sektor pendidikan dan industri dapat mempercepat adopsi teknologi digital dengan menyediakan akses terhadap pengetahuan serta sumber daya yang diperlukan (Giones & Brem, 2017).

3. Tantangan Distribusi dan Logistik

IKM di Nusa Tenggara Barat menghadapi berbagai tantangan dalam distribusi dan logistik yang disebabkan oleh kondisi geografis dan infrastruktur yang belum optimal. Di mana efisiensi logistik menjadi faktor utama dalam keberlanjutan usaha (Chopra & Meindl, 2014). Salah satu hambatan utama distribusi di NTB adalah keterbatasan infrastruktur transportasi. NTB terdiri dari dua pulau besar, Lombok dan Sumbawa, serta pulau-pulau kecil lainnya, yang mempengaruhi proses logistik menjadi lebih kompleks. Infrastruktur di beberapa daerah masih terbatas, sehingga distribusi barang antar wilayah menjadi tidak efisien dan memakan waktu yang lebih lama. Dalam hal ini, jarak dan biaya transportasi

mempengaruhi efisiensi produksi dan distribusi (Weber, 1929). Bahwa sistem logistik yang kurang efisien dapat menghambat pertumbuhan ekonomi regional dan mengurangi daya saing industri. (Rodrigue dkk., 2013).

Selain infrastruktur, faktor biaya logistik yang tinggi menjadi tantangan utama bagi pelaku IKM di NTB. Biaya transportasi laut dan darat yang tinggi berdampak pada harga jual produk menjadi lebih mahal dibandingkan daerah lain dengan kestabilan akses logistik. Bahwa biaya logistik yang tinggi dapat mengurangi margin keuntungan dan menghambat ekspansi bisnis (Christopher, 2016). Laporan dari Badan Pusat Statistik (BPS) NTB mencatat bahwa tingginya biaya logistik menyebabkan ketimpangan harga antara produk lokal dan produk yang diimpor dari daerah lain, sehingga produk IKM menjadi kurang kompetitif (Badan Pusat Statistik NTB, 2022, hlm. 78). Masalah lainnya adalah ketersediaan bahan baku. Di mana banyak industri kecil masih bergantung pada bahan baku yang harus diimpor dari luar daerah justru menambah biaya produksi dan meningkatkan risiko keterlambatan dalam proses produksi. Hal ini menekankan bahwa ketersediaan bahan baku yang stabil merupakan elemen kunci dalam efisiensi produksi (Chopra & Meindl, 2014). Sementara rantai pasokan yang terlalu bergantung pada sumber eksternal sangat berisiko mengalami gangguan, terutama dalam kondisi keterbatasan infrastruktur (Simchi-Levi dkk., 1999).

Keterbatasan akses bahan baku dan distribusi yang mahal menjadi faktor utama pertumbuhan IKM di daerah kepulauan Indonesia menjadi terhambat (Alfenza & Achmadi, 2012). Termasuk NTB, perlunya kebijakan pemerintah yang mendukung industri kecil seperti pemberian subsidi transportasi atau insentif fiskal untuk membantu mengurangi beban logistik. Selain faktor biaya dan ketersediaan bahan baku, sistem manajemen logistik yang belum optimal menjadi hambatan bagi pelaku IKM di NTB. Dalam teori manajemen rantai pasokan modern, sistem distribusi yang efisien memerlukan koordinasi yang baik antara berbagai aktor dalam rantai pasokan, termasuk produsen, distributor, dan penyedia jasa transportasi (Mentzer dkk., 2001). Namun, di NTB, koordinasi ini masih menghadapi kendala karena kurangnya akses terhadap teknologi digital yang dapat meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan logistik. Bahwa digitalisasi dalam rantai pasokan dapat meningkatkan efisiensi distribusi, mengurangi biaya operasional, dan mempercepat waktu pengiriman (Gunasekaran dkk., 2017). Sehingga

digitalisasi dalam sistem logistik di NTB perlu menjadi salah satu fokus utama dalam upaya meningkatkan daya saing industri lokal.

Maka peran pemerintah dalam membangun infrastruktur transportasi yang lebih baik serta menyediakan insentif bagi pelaku IKM sangat penting untuk dimasifkan. Investasi berupa pembangunan jalan, pelabuhan, dan sistem logistik modern akan sangat membantu mengurangi biaya transportasi serta meningkatkan efisiensi distribusi. Kebijakan pemerintah berupa subsidi transportasi dan insentif pajak bagi pelaku IKM yang beroperasi pada wilayah dengan infrastruktur terbatas dapat membantu mengurangi beban biaya. Secara keseluruhan, tantangan logistik dan distribusi di NTB merupakan permasalahan yang kompleks dan memerlukan pendekatan multi-dimensi dalam penyelesaiannya. Memperbaiki infrastruktur, meningkatkan koordinasi dalam rantai pasokan, serta mengadopsi teknologi digital dalam manajemen logistik, pelaku IKM di NTB dapat lebih berdaya saing dan berkembang secara berkelanjutan. Maka dengan dukungan kebijakan yang tepat dan investasi berkelanjutan dalam sektor transportasi dan logistik, kendala dari pelaku IKM di NTB dapat dimanimalisir dengan baik. Sehingga pelaku IKM dapat berkontribusi lebih optimal terhadap perekonomian daerah dan nasional.

Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Peran Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Ikm di NTB

Dalam pandangan ekonomi Islam, pemerintah daerah berperan sebagai *ḥākim al-maṣāliḥ*, yaitu pihak yang bertanggung jawab untuk memastikan tercapainya kemaslahatan publik dan keadilan ekonomi. Bahwa pemerintah tidak hanya berfungsi sebagai pengatur administratif, tetapi juga memiliki tanggung jawab moral dan struktural untuk menghilangkan kemudharatan (*raf' al-dārar*), melindungi kepentingan kelompok yang lemah, serta menjamin distribusi manfaat pembangunan secara adil. Melalui hasil penelitian, dapat dibuktikan bahwa ternyata Dinas Perindustrian Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) telah berupaya memberdayakan Industri Kecil dan Menengah (IKM) melalui berbagai program seperti sertifikasi produk, pelatihan, pendampingan, dan pengelolaan sistem informasi industri. Akan tetapi, peran ini masih terjebak dalam pendekatan teknokratis-administratif dan belum sepenuhnya menyentuh pada akar permasalahan struktural yang dihadapi oleh

IKM. Sehingga upaya-upaya dari pemerintah Nusa Tenggara Barat terhadap IKM penting untuk terus dimasifkan.

Pada konteks ekonomi Islam, perlindungan terhadap harta (*hifz al-māl*) tidak hanya berarti dilakukan secara legal formal, tetapi juga mencakup penciptaan kondisi ekonomi yang memungkinkan pelaku usaha kecil untuk mempertahankan dan mengembangkan aset produktif mereka secara adil (Sadeq, 1987). Bahwa banyak IKM di NTB yang menghadapi tantangan berupa akses pasar, permodalan, dan distribusi, menunjukkan fungsi pemerintah dalam menjamin perlindungan harta masih berjalan secara parsial. Walaupun pemerintah telah hadir dengan bentuk kebijakannya, efektivitasnya dalam mengatasi ketimpangan struktural yang melemahkan posisi tawar IKM di pasar masih perlu ditingkatkan.

Sertifikasi produk yang difasilitasi oleh Dinas Perindustrian sejalan dengan prinsip amanah dan kejujuran dalam ekonomi Islam (al-Mawardi, 1996, hlm. 134). Sertifikasi ini berfungsi sebagai jaminan kualitas, perlindungan konsumen, dan penguatan kepercayaan pasar. Namun sertifikasi tidak serta merta meningkatkan keadilan distribusi dan akses pasar bagi pelaku IKM. Produk yang telah tersertifikasi masih menghadapi tantangan dalam penetrasi pasar, baik karena lemahnya jaringan distribusi maupun dominasi pelaku usaha besar (Schumpeter, 2021b, hlm. 74). Dalam kerangka ekonomi Islam, hal ini menunjukkan bahwa sertifikasi berisiko menjadi simbol administratif jika tidak diimbangi dengan kebijakan afirmatif dari pemerintah untuk membangun struktur pasar yang adil dan tidak eksploitatif. Pemerintah seharusnya tidak hanya menjamin standar, tetapi juga memastikan bahwa standar tersebut berfungsi sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi.

Pemberdayaan IKM melalui pelatihan serta peningkatan kapasitas menjadi upaya *ta'awun* (tolong-menolong) dan *takaful* (saling menjamin) antara pemerintah dengan masyarakat (Antonio, 2001, hlm. 87). Namun rendahnya literasi digital, keterbatasan kemampuan manajerial, dan kurangnya pendampingan berkelanjutan mengakibatkan program pelatihan belum menghasilkan transformasi yang signifikan. Dalam perspektif *maqāṣid al-sharī'ah*, kondisi ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap akal (*hifz al-'aql*) dan harta (*hifz al-māl*) belum berjalan secara optimal (Al-Ghazali, 1993, hlm. 51). Pemberdayaan yang dilakukan masih bersifat teknis dan jangka pendek, dan belum membangun kesadaran kritis, kemandirian, serta kapasitas adaptif pelaku IKM dalam

menghadapi perubahan struktur ekonomi yang semakin kompleks (Chapra, 2016). Dalam konteks ini, kebijakan ekonomi yang didasarkan pada kemaslahatan tidak hanya memperhatikan aspek material, tetapi juga aspek moral dan spiritual masyarakat.

Proses industrialisasi daerah yang diarahkan pada pengembangan sektor unggulan berbasis sumber daya lokal seharusnya sejalan dengan prinsip kemaslahatan dan kemandirian ekonomi. Namun dengan keterbatasan infrastruktur dan tingginya biaya logistik, menyebabkan manfaat industrialisasi belum terdistribusi secara merata antar wilayah. Maka ketimpangan spasial ini berpotensi memperlebar jurang ekonomi antara wilayah yang memiliki akses infrastruktur memadai dan wilayah yang tertinggal. Maka dalam ekonomi Islam, kondisi ini bertentangan dengan prinsip *'adl* dan *tawāzun*, yang menuntut akan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pemerataan manfaat pembangunan (Aprianto, 2016). Industrialisasi yang tidak diimbangi dengan kebijakan distribusi secara adil berisiko melanggengkan ketimpangan struktural.

Permasalahan permodalan menjadi isu krusial yang paling nyata menunjukkan belum adanya keadilan ekonomi yang substansial. Sehingga ketergantungan pelaku IKM pada pembiayaan konvensional berbasis agunan menunjukkan bahwa sistem pembiayaan yang inklusif belum terbangun. Maka dalam konteks ini, pembiayaan seharusnya didasarkan pada prinsip kemitraan dan berbagi resiko melalui skema *musyarakah* dan *mudārabah*, yang lebih sesuai dengan karakter usaha kecil (Siddiq, 2004, hlm. 145). Walaupun sistem informasi industri yang dikembangkan pemerintah NTB cenderung berpotensi untuk mengurangi asimetri informasi antara pelaku usaha dan lembaga keuangan, tanpa integrasi yang kuat dengan lembaga keuangan syariah (Ascarya, 2009, hlm. 52). Sistem tersebut belum mampu mendorong keadilan dalam akses pembiayaan. Akibatnya yaitu pelaku IKM tetap berada dalam posisi rentan dan kesulitan untuk mengembangkan usaha secara berkelanjutan.

Bahwa pemberdayaan industri kecil dan menengah di Nusa Tenggara Barat dalam kerangka ekonomi Islam masih menempatkan peran pemerintah sebagai fasilitator teknis, tanpa berfungsi sebagai penjamin keadilan ekonomi yang struktural. Penerapan prinsip-prinsip *maqāṣid al-sharī'ah*, terutama dalam *hal ḥifẓ al-māl*, *ḥifẓ al-'aql*, keadilan (*'adl*), saling menjamin (*takaful*), dan kerjasama (*ta'āwun*), belum sepenuhnya terintegrasi dalam

perancangan dan pelaksanaan kebijakan industri daerah. Maka dari itu, ada kebutuhan mendesak untuk merombak peran pemerintah daerah agar lebih substantif. Bahwa tidak hanya dalam meningkatkan kapasitas teknis pelaku IKM, tetapi juga dalam membangun struktur ekonomi yang adil, inklusif, dan berkelanjutan. Reposisi ini menjadi syarat penting agar pemberdayaan IKM dapat benar-benar berfungsi sebagai alat untuk mencapai kemaslahatan publik sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam ekonomi Islam.

Maka dari itu, pemberdayaan IKM berbasis Ekonomi Islam tidak hanya bertujuan meningkatkan kapasitas ekonomi pelaku usaha, tetapi juga memperkuat solidaritas sosial dan distribusi keadilan dalam masyarakat. Kolaborasi antara pemerintah daerah, lembaga keuangan syariah, dan komunitas masyarakat menjadi kunci dalam mewujudkan pemberdayaan yang berkelanjutan dan berbasis kemaslahatan. Dalam memastikan keberhasilan program ini, diperlukan kebijakan yang berkelanjutan, peningkatan literasi digital, serta dukungan teknologi yang memadai. Melalui pendekatan berbasis nilai-nilai Islam, pemberdayaan IKM dapat menjadi instrumen penting dalam membangun masyarakat yang berkeadilan dan Sejahtera secara berkelanjutan.

KESIMPULAN

Pengembangan Industri Kecil dan Menengah tidak bisa lagi dipandang hanya sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas usaha. Sebaliknya, hal ini harus diintegrasikan menjadi bagian dari strategi pembangunan ekosistem ekonomi lokal yang akan menentukan daya saing daerah dalam jangka panjang. Bahwa ketika akses pasar, teknologi produksi, dan infrastruktur logistik belum terhubung dengan baik, kebijakan pemberdayaan berisiko menjadi terfragmentasi dan tidak mampu mendorong transformasi secara struktural yang diperlukan. Kondisi ini mempertegas pandangan bahwa keberhasilan pembangunan ekonomi lokal sangat bergantung pada keterpaduan antara kebijakan, kelembagaan, dan lingkungan industri yang memungkinkan pelaku usaha kecil dapat beradaptasi terhadap perubahan pasar, baik di tingkat nasional maupun global. Termasuk dalam meningkatkan produksi hingga daya saing yang berkelanjutan.

Tantangan yang dihadapi IKM di Nusa Tenggara Barat (NTB) menunjukkan bahwa intervensi pemerintah perlu beralih dari pendekatan sektoral ke pendekatan kolaboratif berbasis ekosistem. Masalah seperti keterbatasan logistik, tingginya biaya

distribusi, dan pemanfaatan teknologi digital yang belum optimal mengharuskan adanya sinergi yang lebih kuat antara berbagai aktor. Termasuk lembaga keuangan, akademisi, sektor swasta, dan pihak-pihak yang bergerak pada aspek teknologi. Upaya fasilitasi seperti pengembangan sistem informasi industri, pelatihan, dan promosi produk, akan memberikan dampak yang lebih signifikan jika disertai dengan pendampingan berkelanjutan, perluasan jaringan pasar, serta investasi dalam infrastruktur dapat memperlancar arus produksi sekaligus distribusi secara efisien dan merata.

Dalam perspektif ekonomi Islam, dinamika ini menegaskan pentingnya peran pemerintah daerah sebagai penjaga kemaslahatan ekonomi. Bukan hanya sebagai regulator yang hanya sebatas mengatur hal-hal teknis dan administratif. Pemberdayaan IKM yang berlandaskan prinsip *maqasid syariah* memerlukan kebijakan yang tidak hanya mendorong pertumbuhan. Melainkan penting juga untuk memastikan keadilan distribusi dan keberlanjutan sosial. Dengan menjadikan IKM sebagai subjek pembangunan, kebijakan industri daerah berpotensi menjadi alat strategis untuk membangun tatanan ekonomi lokal yang kompetitif, inklusif, dan berorientasi pada kesejahteraan bersama secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- A. Hardiansyah, “*Buku Ajar Pemberdayaan Masyarakat*”, (Jawa Tengah: Eureka Media Aksara, 2023).
- Adhiwarman Aswar Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer* (Gema Insani Pres, 2001).
- Alfred Weber, *Theory of the Location of Industries* (University of Chicago Press, 1929).
- Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah* (Raja Grafindo Persada, 2009).
- Azis Muslim, *Metodologi Pengembangan Masyarakat*, (Yogyakarta: Penerbit Teras, 2009).
- Bakir, R. Sutyo, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (Tangerang: Karisma Publishing Group, 2009)
- Clayton M. Christensen, *The Innovator’s Dilemma: When New Technologies Cause Great Firms to Fail*, First Edition (Harvard Business Review Press, 1997).
- Dave Chaffey and P. R. Smith, *Digital Marketing Excellence: Planning, Optimizing and Integrating Online Marketing*, 5th edition (Routledge, 2017).

- David Simchi-Levi, Philip Kaminsky, and Edith Simchi-Levi, *Designing and Managing the Supply Chain: Concepts, Strategies, and Cases w/CD-ROM Package*, Book plus CD-Rom edition (McGraw-Hill/Irwin, 1999).
- Edward J. Blakely dan Nancey Green Leigh, *Theories of Lokal Economic Development* (Singapura: Sage Publisher, 2003).
- Everett M. Rogers, *Diffusion of Innovations, Fourth Edition*, 4th edition (Free Press, 1995).
- Friedmann, *Empowerment: The Politics of Alternative Development* (Malden: Blacwell Publisher, 1992).
- Gary S. Becker, *Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis, with Special*
- Hamid, Hendrawati, *Manajemen Pemberdayaan Masyarakat*, (Makasar: De La Macca, 2018).
- Havis Aravik, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer* (Depok: Kencana, 2018).
- Henry William Chesbrough, *Open Innovation: The New Imperative for Creating and Profiting from Technology* (Harvard Business Press, 2003).
- I Putu Gede Diatmika & Sri Rahayu, “*Mode Pemberdayaan Masyarakat dan Peran Pemerintah*”, (Malang: Ahlimedia Press, 2022)
- Ibrahim, “*Metodologi Penelitian Kualitatif (Panduan Penelitian Beserta Contoh Proposal Kualitatif)*”, (Bandung: Alfabeta, 2018).
- Imam Al-Ghazali, *Al-Mustashfa* (Dar Al-Kutub al-Islamiyah, 1993), JILID 1.
- Imam al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah* (Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1996).
- James E. Rowe, *Theories of Lokal Economic Development Linking Theory to Practice* (Abingdon: Taylor & Francis, 2016).
- Jean-Paul Rodrigue, Claude Comtois, and Brian Slack, *The Geography of Transport Systems* (Routledge, 2013).
- Joe Tidd and John R. Bessant, *Managing Innovation: Integrating Technological, Market and Organizational Change*, 7th edition (Wiley, 2020).
- Joseph A. Schumpeter, *The Theory of Economic Development*, 1st edition (Routledge, 2021).
- M. Dawam Rahardjo, *Membangun Masyarakat Madani* (Pustaka Pelajar, 1995).
- M. Umer Chapra, *The Future of Economics: An Islamic Perspective* (The Islamic Foundation, 2016).
- M.R. Khairul Muluk, “*Peran Pemerintah Daerah dalam Pembangunan Indonesia (Proceedings)*” (Malang: UB Press, 2013).
- Malcolm Payne, *Modern Social Work Theory*, 3rd edition (Lyceum Books, 2005).
- Martin Christopher, *Logistics and Supply Chain Management: Logistics & Supply Chain Management*, 5th edition (FT Publishing International, 2016).
- Matthew B., Miles, dan A. Michael Huberman, “*Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*”, 2nd ed. (Thousand Oaks, CA: Sage Publications, 1994), 10-12.
- Michael E. Porter, *Competitive Advantage of Nations*, First Edition (Free Press, 1990).
- Michael E. Porter, *Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance*, 1st edition (Free Press, 1985).

- Miles, Matthew B., dan A. Michael Huberman, “*Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*”, 2nd ed. (Thousand Oaks, CA: Sage Publications, 1994).
- Mohammad Nejatullah Siddiq, *Rethinking Islamic Economics* (The Islamic Foundation, 2004).
- Mohsin Khan, *Islamic Economic Principles and the Role of Government*. (New York: Routledge, 2006).
- Muhammad Hasan & Muhammad Azis, “*Pembangunan Ekonomi & Pemberdayaan Masyarakat (Strategi Pembangunan Manusia dalam Perspektif Ekonomi) Edisi Kedua*”, (Pustaka Taman Ilmu, 2018).
- Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank syariah: dari teori ke praktik* (Gema Insani, 2001).
- Nathan Rosenberg and Ralph Landau, *The Positive Sum Strategy: Harnessing Technology for Economic Growth*, (National Academies Press, 1986).
- Peter F. Drucker, *Innovation and Entrepreneurship*, Reprint edition (Harper Business, 2006).
- Philip Kotler and others, *Marketing Management*, 3rd edition (Pearson Education, 2016).
- Philip McCann, *Modern Urban and Regional Economics* (Oxford, OUP Oxford, 2013).
- Rahmat Setiawan, *Digitalisasi IKM: Peluang Dan Tantangan Di Era Industri 4.0* (Pustaka Media, 2020).
- Reference to Education, 3rd Edition*, 3rd edition (University of Chicago Press, 1994).
- Sarlito Wirawan Sarwono, “Teori-Teori Psikologi Sosial”, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015).
- Satori, Djam’an & Komarian, Aan, “*Metode Penelitian Kualitatif*”, (Bandung: Alfabeta, 2014).
- Sedarmayanti, *Sumber Daya Manusia Produktivitas Kerja*, (Jakarta: Mandar maju, 2001).
- Solihah, Ratnia, “Perihal Pemerintah dan yang Diperintah, “*Pengantar Ilmu Pemerintahan*”, (2019).
- Sugiono, “*Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&Q)*”, (Bandung: Alfabeta, 2018).
- Suharto, Edi, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2005).
- Sunil Chopra and Peter Meindl, *Supply Chain Management: Strategy, Planning, and Operation*, 6th edition (Pearson, 2014).
- Tulus T. H. Tambunan, *UMKM Di INDONESIA: Perkembangan, Kendala, dan Tantangan* (Prenada Media, 2021).

Artikel/Jurnal:

- A. H. M. Sadeq, ‘Economic Development in Islam’, *International Journal of Economics, Management and Accounting*, 1.1 (1987).
- Abd. Ghafur & Nurul Fadila, “Peran Pemerintah dalam Ekonomi Islam”, dalam jurnal *Iqtishodiyah*, Volume, 6, Nomor I, Januari 2020.
- Ainul Fadilah Rachmawati, dkk, Upaya Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Ekonomi Melalui Pemberdayaan Industri Kecil Menengah (Studi Pada Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar Kabupaten Jombang dan Sentra Kerajinan Cor Kuningan Desa Mojotrisno Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang, Dalam Jurnal Administrasi Publik (JPA), Vol. 3, No. 7

- Angappa Gunasekaran, Nachiappan Subramanian, and Thanos Papadopoulos, 'Information Technology for Competitive Advantage within Logistics and Supply Chains: A Review', *Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review*, 99 (2017).
- Annamaria Lusardi and Olivia S. Mitchell, 'The Economic Importance of Financial Literacy: Theory and Evidence', *Journal of Economic Literature*, 52.1 (2014).
- Annamaria Lusardi and Peter Tufano, 'Debt Literacy, Financial Experiences, and Overindebtedness', *Journal of Pension Economics & Finance*, 14.4 (2015).
- Bronwyn H. Hall and Beethika Khan, 'Adoption of New Technology' (National Bureau of Economic Research, May 2003).
- D. B. Audretsch, 'What's New about the New Economy? Sources of Growth in the Managed and Entrepreneurial Economies', *Industrial and Corporate Change*, 10.1 (2001).
- Dani Rodrik, 'Industrial Policy for the Twenty-First Century' (Social Science Research Network, 1 November 2004).
- Della Aprilia Kartika Putri, Fatiya Diana Wulandari Putri, and Rahayu Rahmawati, 'Pemberdayaan Perekonomian Masyarakat Desa Jubung Melalui Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)', *Jurnal Kewirausahaan Cerdas dan Digital*, 1.3 (2024).
- Elabe Pinti, "Pelaksanaan Penjualan Konsinyasi dalam Mengembangkan Usaha Pada Industri Kecil dan Menengah (IKM) Pangan Kota Pekanbaru Ditinjau Menurut Ekonomi Islam" (2013)
- Faisal Restu Ardiansya, dkk, "Strategi Industrialisasi: Pola IKM dan UMKM di Surabaya", dalam *Jurnal Manajemen Kreatif dan Inovasi*, Vol. 1, No. 3 Juli 2023
- Ferran Giones and Alexander Brem, 'Digital Technology Entrepreneurship: A Definition and Research Agenda', *Technology Innovation Management Review*, 7.5 (2017).
- Fred D. Davis, 'Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use, and User Acceptance of Information Technology', *MIS Quarterly*, 13.3 (1989).
- Jay Barney, 'Firm Resources and Sustained Competitive Advantage', *Journal of Management*, 17.1 (1991).
- John T. Mentzer and others, 'Defining Supply Chain Management', *Journal of Business Logistics*, 22.2 (2001).
- Joshua S. Gans and Scott Stern, 'The Product Market and the Market for "Ideas": Commercialization Strategies for Technology Entrepreneurs', *Research Policy*, Special Issue on Technology Entrepreneurship and Contact Information for corresponding authors, 32.2 (2003).
- Kadek Wulandari Laksmi, "Peran Disperindag Dalam Pemberdayaan Industri Kecil Menengah Daerah Gianyar", dalam *Jurnal Abdimas Mandiri*, Volume 7, No. 2, Agustus 2023

- Kevin Zhu, Kenneth L. Kraemer, and Sean Xu, 'The Process of Innovation Assimilation by Firms in Different Countries: A Technology Diffusion Perspective on E-Business', *Management Science*, 52.10 (2006).
- Marco Tieman, Maznah Che Ghazali, and Jack G. A. J. van der Vorst, 'Consumer Perception on Halal Meat Logistics', *British Food Journal*, 115.8 (2013).
- Mohammed Obaidullah, 'Introduction to Islamic Microfinance' (Social Science Research Network, 1 August 2008), p. 72 <<https://papers.ssrn.com/abstract=1506072>>.
- Muhammad Aqim Adlan, 'Peran Pemerintah dalam Menyelamatkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Era Pandemi Covid-19 (Sebuah Kajian dalam Perspektif Ekonomi Islam)', dalam *Jurnal Ekonomi Syariah: An-Nisbah*, Volume 08, Nomor 01, April 2021.
- Muhammad Darul Fadli, Sisi Amalia, Peranan Dinans Perindustrian dan Perdagangan Ekonomi Sumber Daya Mineral Dalam Pemberdayaan IKM (Industi Kecil Menengah) di Kota Pontianak, dalam *Jurnal Prosiding Seminar Nasional Program Studi Ekonomi Islam*, Vol 1, 2023
- Naerul Edwin Kiky Aprianto, 'KEBIJAKAN DISTRIBUSI DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI ISLAM', *Al-Ammal: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syari'ah*, 8.2 (2016).
- Nur Anita and Muhammad Luthfi Iznillah, 'Pengaruh Sertifikasi Dan Standardisasi Produk Terhadap Peningkatan Penjualan Dan Daya Saing UMKM', *Jurnal Akuntansi Dan Ekonomika*, 13.1 (2023).
- Rizky Wahyudi, 'Peran Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam Pengembangan Industri Kecil Menengah Kota Medan, dalam *Sibatik Journal*, Volume 1. No. 5 (April 2022).
- Sheshadri Chatterjee and Arpan Kumar Kar, 'Why Do Small and Medium Enterprises Use Social Media Marketing and What Is the Impact: Empirical Insights from India', *International Journal of Information Management*, 53.3 (2020).
- Slamet Hariyanto, "Pemberdayaan Industri Kecil di kabupaten Tulungagung"
- Spencer Henson and John Humphrey, 'Understanding the Complexities of Private Standards in Global Agri-Food Chains as They Impact Developing Countries', *The Journal of Development Studies*, 46.9 (2010).
- Stiglitz and Weiss, 'Credit Rationing in Markets with Imperfect Information'.
- Stijn Claessens and others, 'Fintech Credit Markets Around the World: Size, Drivers and Policy Issues' (Social Science Research Network, 1 September 2018) <<https://papers.ssrn.com/abstract=3288096>>.
- Surya Abraham, Peran Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Dalam Pemberdayaan Industri Kecil di kampung Tanjung Isuy kecamatan Jepang Kabupaten Kutai Barat, dalam *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Volume 4, Nomor 3, 2016

- Syakir Sofyan, “Peran Negera Dalam Perekonomian (Tinjauan Teoritis Kebijakan Fiskal Dalam Ekonomi Islam)”, *Hunafa: Jurnal Studi Islamika*, Vol. 13, 2 Desember 2016.
- Taufik Alwi, Sunarso Sunarso, and Titin Maidarti, ‘Peningkatan Penjualan Melalui Eksepsi Dan Sertifikasi Halal’, *Jurnal Pengembangan Wiraswasta*, 21.1 (2019).
- Tegar Ainurrokhim, Kiskendra Citra Hati, and Naufal Daffa Adibta, ‘Digital Transformation in Small and Medium Enterprises (SMES): Challenges and Opportunities in Indonesia’, in *Proceeding of the International Conference on Management, Entrepreneurship, and Business* (presented at the ICMEB, 1).
- Thorsten Beck and Asli Demirguc-Kunt, ‘Small and Medium-Size Enterprises: Access to Finance as a Growth Constraint’, *Journal of Banking & Finance*, 30.11 (2006).
- Thorsten Beck, Asli Demirgüç-Kunt, and Vojislav Maksimovic, ‘Financial and Legal Constraints to Growth: Does Firm Size Matter?’, *The Journal of Finance*, 60.1 (2005).
- Tiara Figur Alfenza and Tri Achmadi, ‘Penentuan Pola Dan Pusat Distribusi Bahan Pokok Untuk Wilayah Berbasis Kepulauan’, *Jurnal Teknik ITS*, 1.1 (2012).
- World Bank, *SME Finance: Policy Guide* (World Bank, 2020).
- Yolanda Britania, dkk, “Peran Kebijakan Fiskal dan Moneter dalam Menjaga dan Menciptakan Stabilitas Perekonomian Indonesia Menurut Perspektif Islam”, dalam *Jurnal: Media Mahardika*, Vol. 22, No. 3, Mey 2024.

Undang-Undang:

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian

Dokumen:

- Badan Pusat Statistik, “Profil Industri Mikro dan Kecil 2022”, Volume 13, 2023
- Kementerian Koperasi dan UKM, *Laporan Kinerja Pemberdayaan IKM*. (Kementerian Koperasi dan UKM, 2020).
- Kementerian Koperasi dan UKM, *Laporan Pengembangan IKM Di Indonesia* (Kementerian Koperasi dan UKM, 2021).
- Kementerian Koperasi dan UKM, *Laporan Tahunan UKM Dan Koperasi* (Kementerian Koperasi dan UKM, 2021).
- Badan Pusat Statistik NTB, *Statistik NTB 2022* (BPS NTB, 2022).

Internet:

- Data Dinas Perindustrian Provinsi NTB, <https://simanis.ntbprov.go.id/>
<https://www.igtishadconsulting.com/content/read/blog/peranan-negara-dalam-perekonomian-perspektif-islam>